

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha yang menjadi peran penting dalam kegiatan perekonomian dan usaha yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha berskala kecil yang dapat dikelola oleh individu maupun sekelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama (Yuliaryani & Herawati, 2019). UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

UMKM telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pemerataan ekonomi yang lebih merata. Dengan memahami bagaimana UMKM membantu perekonomian, dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk membantu sektor ini mencapai potensi (Trisnadewi & Dewi, 2023). Oleh karenanya, dengan memahami peran UMKM diharapkan mampu menemukan permasalahan apa yang dihadapi oleh UMKM, serta mencari jalan keluar yang akurat untuk menangani permasalahan tersebut. Pertumbuhan di masa depan yang kemudian dapat membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat (Raja et al., 2023).

Perkembangan UMKM berkembang pesat dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yang signifikan baik dalam jumlah unit, penyediaan lapangan kerja, maupun jumlah output yang dihasilkan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 64 juta perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. UMKM ini menyumbang lebih dari 60% dari PDB nasional dan menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM di Bali, mengatakan pertumbuhan UMKM di Bali mencapai 6,4% pertahunnya (balipost.com). (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) tentang UMKM menetapkan kriteria UMKM sesuai dengan skala yang diatur perseorangan atau badan.

Dalam menjalankan usaha diperlukan pengendalian pada internal usaha, salah satu komponen penting untuk keberlangsungan usaha yaitu adanya pembuatan pencatatan keuangan, (Tratama & Sari, 2024). Revolusi UMKM yang semakin tinggi, jika tidak diikuti dengan kemampuan dari pelaku UMKM untuk bersaing dengan usaha lainnya, maka UMKM tersebut akan beresiko tersisihkan dari persaingan usaha. Persaingan dalam dunia usaha yang semakin luas menyebabkan tingkat laba yang didapatkan pelaku usaha mengacu pada keadaan dimana pendapatan yang diperoleh akan sama dengan pengeluaran bahan pada produk. Salah satu tantangan terbesar UMKM dalam menjalankan usaha adalah pengelolaan dana (Andriyani, 2020).

Dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari standar-standar penyusunan laporan keuangan yang didesain sesuai dengan target agar setiap pelaku usaha selalu baik dalam penyusunan pembukuan sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan usaha yang

dijalaninya. Pengguna laporan keuangan melandaskan pengambilan keputusan-keputusannya terhadap hasil analisis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi keuangan ditunjukkan untuk para pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu, Laporan keuangan yang tersajikan harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), yang diterbitkan oleh Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, (iaiglobal.or.id). Tujuan laporan keuangan sesuai dengan standar adalah memberikan fasilitas yang lebih sederhana untuk kebutuhan pelaporan dan penyajian laporan keuangan UMKM untuk memberikan informasi usaha yang bersifat material, dan kepentingan pengelola dalam mengambil keputusan ekonomi dalam menjalankan usahanya (Oktaviyah, 2022).

Salah satu faktor penghambat bagi UMKM untuk memperoleh akses ke sumber pembiayaan formal adalah kurangnya dokumentasi keuangan yang memenuhi standar akuntansi hal ini menyebabkan lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka (Mutiar & Yudiantara, 2021). Beberapa riset yang pernah dilakukan juga menemukan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh UMKM walaupun persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam

SAK EMKM masih didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memperkenalkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

Di pertengahan tahun 2016 IAI menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) (IAI, 2016). SAK EMKM merupakan suatu standar yang paling sederhana, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan EMKM perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. Misalnya SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga umkm cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Sehingga teknik pengukuran biaya persediaan digunakan metode biaya standar atau metode eceran demi mendapatkan kemudahan (Lusita, 2018).

Perbedaan SAK ETAP dengan SAK EMKM yaitu ada pada SAK EMKM diperuntukan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan karakteristik EMKM sesuai dengan regulasi EMKM di Indonesia. Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK EMKM, beberapa diantaranya adalah komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, sehingga cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (Suastini et al., 2018).

Dalam skala lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian, baik di pedesaan maupun perkotaan. Salah satu contohnya adalah Desa Pancasari, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor UMKM, terutama di bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat dan sektor perdagangan yang terus berkembang. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah serta kewirausahaan masyarakat, UMKM di Desa Pancasari berpeluang menjadi penggerak utama ekonomi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan lokal. Berikut merupakan data UMKM yang ada di Desa Pancasari:

Tabel 1.1

Data UMKM Desa Pancasari

No	Nama Dusun Desa Pancasari	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Agribisnis
1.	Banjar Dinas Buyan	25	8
2.	Banjar Dinas Dasong	27	10
3.	Banjar Dinas Karma	9	6
4.	Banjar Dinas Peken	15	8
5.	Banjar Dinas Lalang Linggah	16	10
	Total	92	42

(Sumber: Kantor Desa Pancasari, 2024)

Berdasarkan tabel 1 data UMKM Desa Pancasari yang disajikan menunjukkan distribusi UMKM di Desa Pancasari berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2024, yang mencakup total jumlah UMKM dan UMKM agribisnis di lima banjar dinas. Secara keseluruhan, terdapat 92 UMKM, dengan 42 di antaranya berperan sebagai usaha agribisnis. Distribusi ini bervariasi di setiap banjar dinas. Banjar Dinas Dasong memiliki jumlah

UMKM tertinggi, yaitu 27 unit, di mana 10 unit merupakan UMKM agribisnis. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi yang lebih aktif di wilayah ini. Banjar Dinas Buyan dan Lalang Linggah memiliki jumlah UMKM masing-masing sebanyak 25 dan 16 unit, dengan 8 dan 10 UMKM agribisnis. Sementara itu, Banjar Dinas Karma memiliki jumlah UMKM paling sedikit, yaitu 9 unit, dengan 6 UMKM agribisnis, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk pengembangan ekonomi di wilayah ini. Informasi ini menyoroti peran signifikan UMKM dalam menopang ekonomi Desa Pancasari. Dengan fokus pada penguatan UMKM agribisnis, desa ini memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antar-usaha. Data ini juga relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi penerapan SAK EMKM yang dapat meningkatkan transparansi keuangan dan akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM di Desa Pancasari pada tanggal 17 November 2024, teridentifikasi bahwa pemahaman dan penerapan pencatatan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) masih rendah. Hal ini tercermin dari pandangan sebagian besar pelaku usaha, seperti Bapak Nyoman Mara dari Sayram Garden dan UD. Agro Mandiri, yang menyebutkan bahwa pencatatan keuangan tidak diprioritaskan karena tidak adanya kewajiban formal untuk membuat laporan keuangan, serta terbatasnya waktu dan tenaga akuntansi. Pandangan serupa diungkapkan oleh Bapak Made Sudana dari UD. Agro Lingga Yoni, yang menilai pencatatan keuangan sebagai proses yang rumit dan tidak penting karena tidak adanya

aturan yang mewajibkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan pernyataan Bapak Gede Hendra Januartawan dari UD. 4T-STA (Sub Terminal Agribisnis), yang menyadari pentingnya pencatatan keuangan untuk mengetahui pendapatan bersih dan mendukung pengambilan keputusan usaha. Ketidakteraturan dalam pencatatan ini menunjukkan minimnya pengetahuan mengenai SAK EMKM dan pentingnya standar akuntansi dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan observasi awal, fenomena yang teridentifikasi menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) di Desa Pancasari masih menghadapi banyak kendala. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai standar. Sebagian besar pelaku UMKM, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nyoman Mara dan Bapak Made Sudana, menganggap bahwa pembuatan laporan keuangan tidak prioritas karena tidak diwajibkan secara formal. Selain itu, keterbatasan waktu dan tenaga akuntansi yang memadai menjadi hambatan dalam menjalankan proses pencatatan yang lebih terstruktur. Kemudian adanya perbedaan persepsi di kalangan pelaku UMKM. Beberapa pelaku usaha, seperti Bapak Gede Hendra Januartawan, menyadari pentingnya pencatatan keuangan untuk mengetahui pendapatan bersih dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, mayoritas pelaku usaha masih melakukan pencatatan secara manual dan tidak terstruktur, yang berpotensi menghambat perkembangan usaha serta menyulitkan akses ke pembiayaan formal. Keterbatasan lain yang dihadapi adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai SAK EMKM. Pelaku

UMKM belum mendapatkan informasi yang memadai terkait manfaat dan cara menerapkan standar ini dalam kegiatan usaha mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun pihak terkait untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Fenomena ini menggambarkan bahwa implementasi SAK EMKM di Desa Pancasari masih menghadapi tantangan baik dari aspek internal, seperti keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia, maupun eksternal, seperti minimnya sosialisasi dan dukungan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor determinan yang memengaruhi implementasi SAK EMKM, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong peningkatan penerapannya di kalangan UMKM lokal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM yaitu faktor pertama pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi yang dimiliki setiap pelaku usaha tentunya berbeda dan setiap pengusaha memiliki sistem pengelolaan keuangan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan implementasi SAK EMKM tidak dapat terlaksanakan secara merata. Pemahaman akuntansi diperlukan sebagai dasar dalam memahami untuk mengimplementasikan SAK EMKM oleh pelaku UMKM. Sebagai dasar menyusun laporan keuangan perlu adanya pemahaman akuntansi untuk memahami dalam pengimplementasian SAK EMKM. Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang mengerti tentang akuntansi dan seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan

berpedoman prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM (Agustini & Purnamawati, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Agustini & Purnamawati, 2022) dan penelitian oleh (Pardita, dkk, 2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Berbeda dengan hasil penelitian (Nurfadilah et al., 2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK EMKM. Maka dari itu, pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dibutuhkan pemahaman akuntansi yang memadai. Pemahaman terhadap penyusunan keuangan akuntansi seharusnya menjadi hal penting dalam berwirausaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesehatan keuangan usaha dan pengambilan untuk keputusan yang tepat.

Faktor kedua kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Rismawandi et al., 2022). Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM diukur dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh pelaku UMKM, kompetensi dalam mengatur keuangan serta keterampilan dan sikap dalam mengelola usahanya. Aspek keterampilan dan sikap tersebut mencakup kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola aspek operasional usaha dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Afi et al., 2020) mengatakan bahwa tingkat kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rismawandi et al., 2022) dan (Lai, 2024) mengatakan bahwa tingkat kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memberikan dampak bagi UMKM, Faktor ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami perannya dengan lebih baik. Pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi SAK EMKM membuktikan bahwa hal tersebut dapat mendorong atau memotivasi pelaku UMKM untuk menerapkan SAK EMKM. Laporan yang disusun sesuai dengan SAK EMKM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, memberikan informasi yang berguna, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Rika Widianita, 2023). Dalam konteks UMKM, sosialisasi SAK EMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Melalui proses ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman akuntansi yang relevan dengan kebutuhan usahanya. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari sosialisasi tersebut dapat memotivasi pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Parhusip & Herawati, 2020) mengatakan bahwa tingkat sosialisasi tidak berpengaruh positif terhadap

implementasi SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Mutuari & Yudiantara, 2021) dan (Rismawandi et al., 2022) mengatakan bahwa tingkat sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.

Faktor keempat adalah kebijakan pemerintah. Peran pemerintah menjadi hal penting untuk mengembangkan UKM. Berbagai kebijakan yang diterapkan meliputi serangkaian langkah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja UKM, memperkuat dan memperluas peran sistem pendukung usaha, serta meningkatkan dukungan terhadap iklim usaha secara keseluruhan. Kebijakan pemberdayaan ini difokuskan pada dua tingkat, yaitu tingkat makro dan mikro. Di tingkat makro, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pendukung usaha, melibatkan lembaga atau sistem yang memberikan dukungan untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif, sehingga usaha dapat diperluas dan kinerja meningkat. Sumber daya produktif meliputi materi mentah, modal, pekerja terampil, pengetahuan, dan teknologi. Perluasan usaha meliputi peningkatan dalam struktur organisasi internal, peningkatan kemampuan, dan perluasan ke pasar yang lebih luas. Sebaliknya, kebijakan pemberdayaan UKM di tingkat mikro dengan meningkatkan kualitas struktur organisasi UKM dan meningkatkan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM) (Sari, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pramestiningrum, dkk, 2020) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tidak berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2024) dan (Sombolayuk, 2023) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan.

Faktor kelima yaitu dukungan lembaga keuangan. Dukungan lembaga keuangan dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Lembaga keuangan dapat menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Lembaga keuangan juga dapat menawarkan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM, karena transparansi keuangan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kelayakan usaha tersebut. Dengan demikian, dukungan dari lembaga keuangan membantu UMKM dalam mengadopsi standar akuntansi yang sesuai, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan daya saing mereka di pasar (Utari et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Sujarweni, 2020) dan (Sungkono, 2024) mengatakan bahwa dukungan lembaga keuangan berpengaruh positif pada UMKM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel yang diteliti. Dimana penelitian yang dilakukan oleh (Agustini & Purnamawati, 2022), (Pardita, dkk, 2019), (Nurfadilah et al., 2019) meneliti mengenai bagaimana pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM. (Rismawandi et al., 2022), (Afi et al., 2020), (Lai, 2024) meneliti mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap penerapan SAK EMKM. (Parhusip & Herawati, 2020), (Mutiari & Yudiantara, 2021) dan (Rismawandi et al., 2022) meneliti mengenai pengaruh Sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM. (Pramestiningrum, dkk, 2020), (Sari, 2024) dan (Sombolayuk, 2023) meneliti mengenai pengaruh kebijakan pemerintah

terhadap UMKM. (Utami & Sujarweni, 2020) dan (Sungkono, 2024) meneliti mengenai pengaruh dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya perbedaan lokasi dan subjek yang diteliti, adanya perbedaan variabel-variabel independen yang diteliti antar penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kemudian fokus dari penelitian ini yang hanya pada UMKM mikro dan berfokus pada UMKM di bidang Agribisnis.

Desa Pancasari merupakan daerah yang memiliki potensi UMKM yang berkembang, namun sejauh ini belum banyak penelitian yang mengkaji penerapan SAK EMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan terhadap implementasi SAK EMKM mempengaruhi keberhasilan penerapannya di Desa Pancasari. Namun kenyataannya, penerbitan SAK EMKM ini belum dilaksanakan dengan optimal oleh UMKM di Desa Pancasari, hal ini terjadi karena pelaku usaha belum mengetahui adanya SAK EMKM dan sulit menerapkan karena adanya faktor internal dan eksternal dalam usahanya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana dan sejauhmana pengaruh determinan yaitu pemahaman akuntansi, kualitas sumber daya manusia, sosialisasi, kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan yang menjadi dasar untuk menilai bagaimana pengimplementasian SAK EMKM terkait perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Originalitas dari penelitian ini yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada maka peneliti mengambil judul **“Determinasi Kesesuaian**

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM di Desa Pancasari”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman akuntansi dimana kurangnya kesadaran dan persepsi negatif terhadap akuntansi pelaku usaha tentang adanya standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).
2. Keterbatasan sumber daya dimana adanya keterbatasan waktu dan tenaga, serta kurangnya tenaga ahli dalam implementasi adanya standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).
3. Pelaku UMKM mayoritas belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan terkait dengan standar akuntansi yang baru yakni SAK EMKM sehingga pelaku UMKM masih kurang mengetahui dan paham dengan SAK EMKM tersebut.
4. Kurangnya dukungan dalam bentuk pelatihan dan akses informasi menghalangi pemahaman pelaku UMKM.
5. Hambatan akses pembiayaan dimana pelaku usaha ketidakmampuan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, lembaga keuangan kurang memberikan dukungan yang cukup bagi UMKM.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi diatas, maka mendapatkan hasil penelitian hanya menfokuskan untuk meneliti permasalahan mengenai Determinan Kesesuaian Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM yang tersebar di Desa Pancasari yang dimana membatasi pada faktor-faktor pengaruh pemahaman akuntansi, sumber daya, sosialisasi, kebijakan pemerintah, dan dukungan lembaga keuangan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Desa Pancasari. Tujuan pembuatan laporan keuangan pada UMKM yaitu untuk memudahkan pelaku UMKM melihat perkembangan usaha yang dimiliki, lebih mudah dalam pengambilan keputusan dan memudahkan pemilik usaha dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

1.4 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap implementasi Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari?
2. Apakah Kualitas sumber daya Manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari?

3. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari?
4. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari?
5. Apakah Dukungan Lembaga Keuangan berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pelaku usaha terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari
2. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari

4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari
5. Untuk menganalisis pengaruh dukungan lembaga keuangan terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM di Desa Pancasari.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk referensi atau informasi untuk penelitian selanjutnya. Selain hal itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan serta pengetahuan di dunia akuntansi dalam implementasi SAK EMKM oleh pelaku UMKM.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sarana penerapan teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.
- b) Bagi UMKM, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dengan SAK EMKM untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi UMKM

- c) Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih mensosialisasikan penyusunan laporan keuangan SAK EMKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM.
- d) Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti permasalahan yang sama terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

